



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

RISALAH RAPAT

- Hari/Tanggal** : Rabu, 7 Juni 2017
Waktu : 14.30 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Grand Mercure Kemayoran
Jl. H. Benyamin Sueb Kav. B6 Kemayoran
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sulawesi Utara
- Peserta** : Hadir:
Sekretariat Kabinet
Kemenko Perekonomian
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kementerian BUMN
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kepala Satuan Kerja Jalan Tol Manado - Bitung
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung 1
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado – Bitung 2
PT Pelindo IV
- Tidak Hadir:
Kemenko Kemaritiman
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR
Kepala BPJT, Kementerian PUPR
Kepala BPIW, Kementerian PUPR
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Kantor BPN, Sulawesi Utara

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Sulawesi Utara

Pembahasan :

Jalan Tol Manado – Bitung

PPK Jalan Tol Manado – Bitung :

- Terdapat penambahan 300 bidang tanah yang dibutuhkan setelah adanya rekayasa lapangan (perpindahan simpang susun dan akses masuk) sehingga pengadaan tanah ditargetkan selesai pada pertengahan 2018. Penetapan Lokasi untuk bidang tambahan tersebut akan diterbitkan minggu depan oleh Gubernur Sulawesi Utara.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- Sampai dengan 7 Juni 2017, sudah ada pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) untuk 8 bidang dari APBD 2013 dan 16 bidang sudah dibiayai oleh BLU LMAN.
- Secara keseluruhan (39 km), pengadaan tanah sudah tuntas sebanyak 30%.
- Menyampaikan bahwa Badan Usaha menghadapi kesulitan dalam memperoleh penggantian melalui dana talangan (BLU LMAN). Oleh karena itu diharapkan agar BLU LMAN dapat memberikan standar *checklist* dokumen yang perlu dilengkapi agar proses tidak berulang-ulang.

Pelabuhan Hub Internasional Bitung

Perwakilan Kementerian Perhubungan untuk PSN Pelabuhan:

- Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan investor RRT dan pada pertengahan JULI 2017 akan melakukan rapat rencana pengembangan pelabuhan Bitung. Selanjutnya akan diadakan revisi Rencana Induk Pelabuhan Bitung yang mencakup lokasi dan integrasi dengan KEK Bitung.
- Kementerian Perhubungan merencanakan skema *Business to Business* antara PT Pelindo IV dan investor. Cakupan yang akan dikerjasamakan akan dibahas lebih lanjut.
- Saat ini telah dibentuk Tim Internal di Kementerian Perhubungan untuk percepatan infrastruktur yang berpotensi dikerjasamakan dengan RRT.

Kemenko Perekonomian

- Menko Kemaritiman menyatakan bahwa PHI Bitung diharapkan tidak menggunakan APBN sehingga dapat dilakukan dengan skema *Business to Business*.
- KPPIP sedang melakukan OBC untuk pengembangan regional Bitung, sehingga tidak hanya fokus pada pengembangan Pelabuhan Hub Internasional saja.

Jalan Penghubung Gorontalo – Manado

Perwakilan Ditjen Bina Marga

- Proyek yang sedang dijalankan oleh Ditjen Bina Marga adalah untuk *maintenance* dan operasional agar jalan yang sudah selesai konstruksi ini dapat berjalan dengan efektif.

Kemenko Perekonomian

- Diharapkan agar dilakukan konfirmasi lebih lanjut terkait cakupan proyek Jalan Penghubung Gorontalo – Manado. Jika proyek yang dimaksud adalah proyek pemeliharaan tanpa pembangunan baru, maka proyek dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung

Kemenko Perekonomian

- Saat ini dibutuhkan pengadaan tanah untuk 92,96 ha. Tetapi saat ini pengadaan tanah terhambat tanah sita yang seharusnya menjadi Hak Penggunaan Lain (HPL).

- Jika tanah tersebut tidak dapat digunakan, maka Gubernur mengusulkan agar dilakukan reklamasi. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah terkait KEK Bitung belum menyebutkan tentang rencana reklamasi.

Tindak Lanjut:

No	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	Jalan Tol Manado-Bitung (39km)	1. Menyusun panduan standard dokumen (<i>checklist</i>) yang dibutuhkan untuk penggantian dana pengadaan tanah dari LMAN agar proses dapat segera berjalan.	BLU LMAN	<i>Akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
		2. Penerbitan revisi Penetapan Lokasi yang dibutuhkan untuk revisi trase	Kementerian PUPR	16 Juni 2017
		3. Kemenko Ekon akan berdiskusi dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian ATR terkait proses percepatan konsinyasi yang belum terdaftar di Mahkamah Agung.	Kemenko Ekon	14 Juni 2017



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

2	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	1. Pihak terkait akan bekerja sama dalam penyusunan kajian terkait pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Kemenko Ekon, Kemenhub, KemenBUMN, PT Pelindo IV	Kajian sudah dimulai dan ditargetkan selesai pada Desember 2017.
---	---	---	--	--